### KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol.2. No.6 Desember 2025

e-ISSN: 3025-5465; p-ISSN: 3025-7964, Hal 514-527

DOI: https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.585





# Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Membangun Ekonomi Inklusif

# Safira Hijriah

231410084.safirahijriah@uinbanten.ac.id Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Nassa Abyan Mufid

231410098.nassaabyanmufid@uinbanten.ac.id Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten **Mega Safitri** 

231410114.megasafitri@uinbanten.ac.id Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Komarudin

231410091.komarudin@uinbanten.ac.id Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

### Mukhlisotul Jannah

mukhlisotul.jannah@uinbanten.ac.id Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Korespondensi penulis: 231410084.safirahijriah@uinbanten.ac.id

Abstract. This study examines the role of Baitul Maal wat Tamwil (BMT) in building an inclusive economy in Indonesia with a focus on its contribution in providing financial access to low-income communities and MSME actors who are not served by formal financial institutions. The purpose of this study is to understand the extent to which BMTs can expand financial inclusion, identify the challenges faced by BMTs in their operations, and evaluate their impact on community welfare and the reduction of economic disparities. The research method used is descriptive qualitative with secondary data analysis from journals, annual reports, and other relevant documents. The results of the study are expected to provide an in-depth understanding of the effectiveness of BMTs in promoting more inclusive economic growth as well as recommendations for optimizing the role of BMTs in achieving social welfare.

Keywords: Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), Inclusive Economy, Financial Inclusion, Social Walfare

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam membangun ekonomi inklusif di Indonesia dengan fokus pada kontribusinya dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana BMT dapat memperluas inklusi keuangan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi BMT dalam operasionalnya, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis data sekunder dari jurnal, laporan tahunan, dan dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas BMT dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta rekomendasi untuk optimalisasi peran BMT dalam mencapai kesejahteraan sosial.

**Kata kunci**: Baitul Mal Wat Tamwill (BMT), Ekonomi Inklusif, Inklusi Keuangan, Kesejahteraan Masyarakat

# LATAR BELAKANG

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat kecil dan menengah yang sering kali sulit mengakses layanan keuangan formal. Lembaga ini hadir dengan tujuan memberikan layanan keuangan kepada masyarakat yang tidak

terjangkau oleh bank konvensional, terutama di pedesaan dan wilayah terpencil. Dengan prinsip syariah, BMT menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan, tabungan, serta layanan sosial berbasis zakat, infak, dan sedekah. Sebagai baitul maal, BMT berfungsi sebagai pengumpul dana yang didistribusikan untuk kepentingan sosial, sementara sebagai baitul tamwil, BMT adalah lembaga bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Namun, dalam menjalankan perannya, BMT menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan modal, keterampilan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Masalah lain yang muncul adalah keterbatasan dukungan yang juga memengaruhi efektivitas infrastruktur dari pemerintah, BMT dalam berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi inklusif. Tantangan yang dihadapi BMT ini menjadi penting untuk dipahami guna mencari solusi yang dapat mendukung keberlanjutan dan optimalisasi peran BMT. Kehadiran BMT diharapkan dapat memberikan akses keuangan bagi masyarakat kecil, yang sering kali terhambat oleh berbagai kendala administratif dan keterbatasan modal, sehingga mereka dapat memanfaatkan layanan keuangan untuk mengembangkan usaha kecil, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki taraf hidup. Selain itu, sebagai lembaga yang menjangkau masyarakat menengah ke bawah, BMT memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Dalam konteks ini, peran pemerintah juga penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif melalui regulasi, penyediaan infrastruktur, dan insentif pendanaan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lima aspek utama, yaitu peran BMT dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat kecil, tantangan yang dihadapi BMT dalam mendorong ekonomi inklusif, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, potensinya dalam meminimalisir kesenjangan ekonomi, serta peran pemerintah dalam mendukung perkembangan BMT. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi BMT dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia

# KAJIAN TEORITIS

# BMT

Menurut Adiwarman Karim, seorang pakar ekonomi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran penting dalam membangun sistem keuangan syariah di tingkat masyarakat lokal. BMT menjadi sarana untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap produk keuangan syariah, sehingga semua lapisan masyarakat, termasuk yang bekerja di sektor informal, bisa menikmatinya.

Adiwarman Karim menjelaskan bahwa BMT bukan hanya lembaga keuangan biasa, tetapi juga alat untuk mendorong perubahan sosial dan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat kecil. Dengan memberikan dukungan kepada usaha mikro, BMT membantu menciptakan ekonomi syariah yang terbuka untuk semua orang. Hal ini membuat BMT menjadi pilar penting dalam mendorong pemerataan ekonomi dan memberdayakan masyarakat agar bisa berkembang lebih baik.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mohammad Idil Ghufron, Rohma Dewi. (2023). Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al- Qur'an. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 7 No. 02.

#### Ekonomi

Kata "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos artinya aturan atau tata cara. Jadi, ekonomi secara sederhana dapat diartikan sebagai cara mengatur atau mengelola kehidupan rumah tangga agar berjalan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ekonomi adalah semua hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mendapatkan, membagi, dan menggunakan barang atau kekayaan, termasuk uang. Jika dijelaskan lebih mudah, ekonomi adalah tentang apa saja yang dilakukan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa, seperti makanan, pakaian, atau layanan. Barang dan jasa ini kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau keinginan manusia. Misalnya, jika sebuah keluarga ingin makan, mereka harus punya penghasilan untuk membeli makanan. Proses mendapatkan uang, membeli makanan, dan memastikan makanan itu cukup untuk semua anggota keluarga, semuanya termasuk dalam ekonomi. Jadi, ekonomi sebenarnya adalah cara manusia mengelola sumber daya seperti uang, waktu, dan tenaga agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya..<sup>2</sup>

Menurut Abraham Maslow, ekonomi adalah ilmu yang membantu manusia menyelesaikan masalah hidup dengan memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Sumber daya ini digunakan berdasarkan teori dan aturan tertentu dalam sistem ekonomi yang dirancang agar efisien dan efektif, dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan hidup. Intinya, ekonomi mengajarkan bagaimana cara terbaik menggunakan apa yang dimiliki untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Robbins, ekonomi mempelajari bagaimana manusia bertindak saat mereka memiliki tujuan, namun sumber daya terbatas. Misalnya, kebutuhan seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal seringkali tidak dapat dipenuhi sekaligus karena keterbatasan uang atau barang. Dalam kondisi ini, manusia harus memutuskan prioritas mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ekonomi membantu kita memahami cara berpikir dan membuat keputusan agar tujuan tetap tercapai meskipun dengan keterbatasan yang ada..<sup>3</sup>

### **Ekonomi Inklusif**

Ada beberapa konsep yang menjelaskan tentang "ekonomi inklusif", yang berfokus pada menciptakan sistem ekonomi yang melibatkan semua orang, bukan hanya sebagian kecil. Konsep-konsep ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana ekonomi seharusnya berkembang dengan cara yang lebih merata dan adil. Masingmasing konsep ini menekankan pentingnya memasukkan berbagai kelompok masyarakat ke dalam sistem ekonomi. Agar lebih mudah dipahami, konsep-konsep ini sering dibandingkan dengan pemikiran ekonomi tradisional, seperti kapitalisme neoliberal, yang cenderung menguntungkan hanya sebagian orang atau kelompok. Semua konsep ini memiliki kesamaan, yaitu menekankan pada "kemajuan ekonomi sejati", yang artinya ekonomi yang berkembang dengan cara yang memberikan manfaat bagi semua orang, bukan hanya sebagian kecil saja.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hendra Safri. (2018). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, Patric C. Wauran. (2020). PERAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA (STUDI KASUS: PEREMPUAN PEKERJA SAWAH DI DESA LEMOH BARAT KECAMATAN TOMBARIRI TIMUR KABUPATEN MINAHASA). *Jurnal Berkala Ilmiah Efiensi*, Volume 20 No. 03.

Menurut Prasetyantoko dan rekan-rekannya, pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang dirancang untuk melibatkan semua orang, tanpa memandang perbedaan seperti suku, agama, atau status sosial. Artinya, setiap orang, baik kaya maupun miskin, muda atau tua, dari daerah mana saja, memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan manfaat dari kemajuan ekonomi. Pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan yang adil bagi semua orang, sehingga tidak ada yang tertinggal atau tidak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Semua lapisan masyarakat bisa ikut serta dalam proses pembangunan dan mendapatkan manfaat yang setara.<sup>4</sup>

Ali dan Son mengatakan bahwa pertumbuhan inklusif bukan hanya tentang menciptakan peluang ekonomi baru, tetapi juga memastikan bahwa semua orang, terutama yang miskin, memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkannya. Untuk bisa disebut pertumbuhan inklusif, pertumbuhan tersebut harus meningkatkan kesempatan sosial bagi semua orang. Ini tergantung pada dua hal: pertama, seberapa banyak peluang yang tersedia bagi masyarakat secara umum; dan kedua, bagaimana peluang tersebut dibagikan kepada semua orang, tanpa ada yang tertinggal. Jadi, pertumbuhan inklusif berarti memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, baik kaya maupun miskin, bisa merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut.<sup>5</sup>

Menurut Ramos dan tim, pertumbuhan ekonomi inklusif itu bukan hanya tentang bagaimana meningkatkan hasil ekonomi, seperti jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Yang lebih penting adalah bagaimana pertumbuhan tersebut memberikan manfaat bagi banyak orang, dengan cara membuka lebih banyak lapangan kerja dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Semua orang, baik yang kaya maupun miskin, seharusnya punya peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi bisa membantu mengurangi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi inklusif berfokus pada pemerataan manfaat agar tidak ada yang tertinggal.<sup>6</sup>

# **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam membangun ekonomi inklusif di masyarakat. Pendekatan ini dianggap tepat karena memungkinkan peneliti untuk menguraikan peran BMT dengan memanfaatkan data sekunder yang sudah ada, yang diperoleh dari berbagai sumber Data sekunder sendiri merupakan informasi kredibel. yang sebelumnya melalui berbagai media, sehingga dikumpulkan dan tersedia peneliti dapat mengaksesnya tanpa harus melakukan pengumpulan data primer. Sumber sekunder dalam penelitian ini meliputi artikel ilmiah dan jurnal yang membahas BMT dan konsep ekonomi inklusif, laporan tahunan yang diterbitkan oleh BMT maupun institusi keuangan terkait, serta hasil penelitian atau survei yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro, pemerintah, atau lembaga penelitian independen yang

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aditya Nugraha Alius, A. A. (2024). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Sumatra Barat. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 28.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hapsari, W. R. (2019). ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH. *JURNAL LITBANG SUKOWATI*, 107.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ramos, R., Ranieri, R., & Lammens, J. (2013). *Inclusive Growth: Building Up a Concept.* IPC-IG Working Paper.

relevan. Selain itu, peneliti juga mengandalkan buku atau dokumen yang memuat informasi mendalam tentang BMT dan ekonomi inklusif, serta data statistik yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau organisasi non-pemerintah yang berfokus pada ekonomi dan inklusi keuangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau literature review, yang memungkinkan peneliti untuk meninjau, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memilih berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini dilakukan dengan beberapa langkah utama. Pertama, peneliti mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang memiliki keterkaitan dengan peran BMT dalam membangun ekonomi inklusif. Identifikasi ini penting untuk memastikan bahwa hanya literatur yang berkualitas dan relevan yang akan dianalisis lebih lanjut. Kedua, peneliti melakukan klasifikasi terhadap literatur yang telah terkumpul berdasarkan tema-tema khusus yang relevan, seperti peran BMT dalam meningkatkan inklusi keuangan, kontribusi BMT dalam pengembangan usaha mikro, keberadaan BMT peningkatan kesejahteraan masyarakat. dampak terhadap Pengelompokan ini memungkinkan peneliti untuk mengelola data dengan sistematis dan memudahkan proses analisis data yang akan dilakukan. Langkah ketiga adalah melakukan penelaahan kritis terhadap isi literatur yang sudah diklasifikasikan, dengan fokus pada poin-poin yang berkaitan langsung dengan pertanyaan penelitian. Dalam tahapan ini, peneliti berusaha memahami berbagai argumen dan temuan yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu, serta mengevaluasi kualitas dan relevansi data yang digunakan. Penelaahan ini dilakukan secara mendalam agar dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai peran BMT dalam membangun ekonomi inklusif. Melalui metode penelitian yang dirancang ini, diharapkan penelitian dapat menyajikan gambaran yang jelas dan detail mengenai bagaimana BMT, sebagai salah satu lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah, berperan dalam mendorong terciptanya ekonomi yang inklusif di tengah masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi para pembaca maupun pihak yang berkepentingan mengenai pentingnya peran BMT dalam inklusi keuangan serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# Peran BMT Dalam Memperluas Akses Keuangan Bagi Masyarakat Kecil

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran penting untuk membantu orang-orang, terutama yang memiliki penghasilan rendah, mendapatkan akses keuangan yang lebih mudah. Banyak orang dari kelompok ini kesulitan mendapatkan layanan dari bank atau lembaga keuangan biasa. BMT hadir untuk memberikan solusi dengan cara menyediakan pinjaman atau pembiayaan yang berbasis pada prinsip syariah (tidak melibatkan bunga).

BMT menawarkan beberapa cara untuk membantu masyarakat mendapatkan modal usaha. Salah satunya adalah dengan sistem bagi hasil, di mana orang bisa mendapatkan pinjaman tanpa perlu memberikan jaminan, dan uang yang dipinjam akan dikembalikan dengan cara bagi hasil yang adil. Ini memudahkan orang untuk memulai usaha mereka tanpa harus takut kehilangan harta atau aset.

Selain itu, BMT juga menyediakan pembiayaan untuk membeli barang dengan

cara jual beli, seperti murabahah (jual beli dengan harga yang telah disepakati) dan istishna (pembelian barang yang dipesan). Dengan skema ini, masyarakat bisa membeli barang-barang yang diperlukan untuk usaha mereka, seperti peralatan atau bahan baku, dengan cara yang lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketika orang-orang mendapatkan pembiayaan dari BMT, mereka mengalami perubahan yang positif. Mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang, usaha mereka jadi lebih produktif, dan usaha mereka juga lebih tahan terhadap berbagai masalah. Jadi, orang yang mendapatkan pinjaman dari BMT cenderung bisa meningkatkan pendapatan mereka dan mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik.

Selain memberikan uang untuk modal usaha, BMT juga menawarkan bantuan lain, seperti pendampingan dan bimbingan. Hal ini sangat berguna untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). BMT tidak hanya memberikan uang, tetapi juga memberikan cara-cara dan saran agar masyarakat bisa menjalankan dan mengembangkan usaha mereka dengan lebih efektif dan sukses. Jadi, dengan bantuan dari BMT, masyarakat dapat belajar cara mengelola usaha mereka agar lebih berkembang.<sup>7</sup>

# Tantangan Utama Yang Dihadapi BMT Dalam Mendorong Ekonomi Inklusif

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menghadapi tantangan yang kompleks dan beragam dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dari tiga jurnal, tantangan yang dihadapi BMT mencakup aspek kelembagaan, keterbatasan modal dan sumber daya manusia (SDM), persaingan dengan lembaga keuangan lain, keterbatasan infrastruktur, hingga ketidakpastian regulasi serta perlindungan simpanan nasabah.

Menurut jurnal yang ditulis oleh Heron, salah satu tantangan utama BMT adalah kelemahan kelembagaan. Sebagai lembaga keuangan mikro dengan skala operasi kecil, BMT sering kali mengalami keterbatasan dalam hal permodalan, infrastruktur, serta sistem manajemen yang memadai. Dengan keterbatasan tersebut, kemampuan BMT untuk menjangkau dan melayani masyarakat secara optimal menjadi terbatas. Selain itu, keterbatasan SDM yang mengelola BMT juga menjadi hambatan signifikan. Banyak pengelola BMT yang belum memiliki kompetensi dalam bidang keuangan syariah, manajemen risiko, atau pengembangan produk inovatif yang dapat menarik lebih banyak nasabah dan memperluas dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Jurnal ini juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang jelas, insentif fiskal, serta program pembinaan komprehensif untuk memperkuat kelembagaan BMT. Tanpa adanya dukungan ini, BMT akan kesulitan mengatasi keterbatasannya dalam mengembangkan produk dan layanan yang kompetitif di pasar keuangan. 8

Sementara itu, Menurut jurnal yang ditulis oleh Khairul Imam Sitopu dan tim,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Heron, N. (2023). Peran Baitul Maal wat Tamwil dalam Peningkatan Kesejahteraan. NOMISMA JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN, 87.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Heron, N. (2023). Peran Baitul Maal wat Tamwil dalam Peningkatan Kesejahteraan. *NOMISMA JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 83.

BMT Mawaridussalam menghadapi berbagai tantangan besar dalam menjalankan kegiatannya di lingkungan Pondok Pesantren Mawaridussalam. Salah satu tantangan utamanya adalah persaingan yang semakin ketat. BMT ini harus bersaing dengan banyak lembaga keuangan lainnya, baik bank biasa (konvensional) maupun bank syariah. Untuk tetap menarik perhatian masyarakat, BMT Mawaridussalam harus terus mencari cara baru dan kreatif untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih menarik dibandingkan pesaingnya.

Masalah lain yang juga sangat berat adalah keterbatasan modal atau uang yang dimiliki BMT. Karena modalnya kecil, BMT jadi kesulitan memberikan pinjaman kepada usaha-usaha kecil atau mikro yang butuh bantuan. Mereka juga tidak bisa menciptakan layanan atau produk baru yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Akibatnya, kemampuan BMT untuk mendukung masyarakat yang ingin membangun usaha jadi sangat terbatas.

Selain itu, BMT Mawaridussalam juga menghadapi kendala dalam hal tenaga kerja. Orang-orang yang bekerja di BMT ini jumlahnya sedikit, dan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan syariah masih perlu ditingkatkan. Pengelola BMT sebenarnya butuh pelatihan dan pendidikan agar mereka lebih ahli dalam menjalankan tugasnya. Jika masalah ini tidak segera diatasi, layanan yang diberikan kepada masyarakat bisa jadi tidak maksimal. Hal ini tentu saja bisa membuat masyarakat merasa kecewa dan beralih ke lembaga keuangan lain yang dianggap lebih baik.

Di sisi lain, Jurnal yang ditulis oleh Pujiyono menjelaskan berbagai masalah yang dihadapi oleh BMT di Jawa Tengah, khususnya saat membantu pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM). Ada dua jenis tantangan utama yang diangkat dalam penelitian ini: tantangan tentang sumber daya manusia (SDM) dan tantangan soal fasilitas atau teknologi.

Masalah pertama, yaitu tentang SDM, berhubungan dengan kurangnya orang yang benar-benar ahli dalam ekonomi dan keuangan syariah. Banyak pegawai atau pengelola BMT memang sudah menempuh pendidikan tinggi, tetapi kebanyakan dari mereka tidak punya latar belakang pendidikan di bidang keuangan syariah. Artinya, meskipun mereka pintar, sering kali mereka tidak memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk menjalankan BMT sesuai prinsip syariah. Hal ini membuat pengelolaan BMT tidak maksimal dan terkadang kurang efektif.

Masalah kedua berkaitan dengan fasilitas dan teknologi. Saat ini, banyak BMT di Jawa Tengah belum memiliki layanan seperti ATM atau sistem online yang bisa membantu masyarakat melakukan transaksi dengan mudah. Penyebabnya adalah biaya untuk menyediakan teknologi ini sangat mahal, sedangkan uang yang dimiliki BMT terbatas. Karena itu, BMT sering kalah bersaing dengan bank atau lembaga keuangan lain yang sudah menawarkan layanan digital modern yang jauh lebih praktis.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Khairul Imam Punantara Sitopu, S. E. (2024). PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PESANTREN (STUDI KASUS PADA PONDOK PESANTRE MAWARIDUSSALAM). Edunomika,

Masalah utama yang dihadapi BMT adalah kepercayaan masyarakat, karena uang yang disimpan oleh nasabah di BMT tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini terjadi karena BMT berada di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM, bukan di bawah pengawasan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Akibatnya, banyak orang ragu menyimpan uang di BMT karena khawatir keamanannya. Untuk mengatasi tantangan ini, BMT harus meningkatkan pelayanan, menyediakan teknologi yang lebih baik, dan membangun kepercayaan masyarakat agar tetap menggunakan jasa mereka.

Kesimpulan dari analisis tiga jurnal menunjukkan bahwa BMT berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam menyediakan pembiayaan syariah bagi UMKM. Namun, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya. Pertama, BMT sering mengalami keterbatasan dalam permodalan dan manajemen internal, yang memengaruhi kapasitasnya dalam menyalurkan pembiayaan. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi khusus dalam keuangan syariah dan manajemen risiko menurunkan profesionalisme dan daya saing. Ketiga, persaingan dengan lembaga keuangan lain menuntut BMT untuk berinovasi, namun infrastruktur teknologi yang terbatas menjadi kendala. Dukungan pemerintah dalam regulasi, perlindungan dana nasabah, dan program pembinaan sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional BMT. Jika tantangan ini dapat diatasi, BMT memiliki potensi besar untuk memperkuat ekonomi inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan ekonomi menengah ke bawah yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal.

# Dampak BMT Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan syariah yang sangat membantu masyarakat, khususnya orang-orang yang memiliki penghasilan kecil atau sedang. Tugas utama BMT adalah memberikan layanan keuangan yang mudah diakses, ringan, dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

Melalui BMT, masyarakat dapat memperoleh pinjaman modal usaha tanpa bunga, seperti yang diterapkan di bank konvensional. Sebagai penggantinya, BMT menggunakan sistem syariah dengan akad bagi hasil, di mana keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan. Sistem ini lebih adil karena tidak membebani nasabah dengan bunga tetap, meskipun usaha mereka mungkin belum menghasilkan.

BMT sangat membantu pelaku usaha kecil dan mikro yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank. Dengan bantuan modal dari BMT, mereka dapat memperluas usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kesejahteraan keluarga. BMT tidak hanya membantu orang memulai usaha, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang dan meraih kehidupan yang lebih baik

Selain fungsi pembiayaan, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) juga punya peran penting dalam mengelola dana sosial yang berasal dari masyarakat. Dana sosial ini meliputi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. BMT tidak hanya menyimpan dana ini, tetapi juga menggunakannya untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Salah dilakukan **BMT** adalah memberikan pelatihan satu hal yang keterampilan. Misalnya, **BMT** mengajarkan masyarakat cara membuat kerajinan tangan, memasak makanan untuk dijual, atau keterampilan lain yang bisa digunakan pelatihan ini, untuk mencari penghasilan tambahan. Dengan orang-orang yang sebelumnya tidak punya keahlian bisa belajar dan mulai menjalankan usaha kecil.

Selain pelatihan, BMT juga memberikan bantuan modal. Untuk mereka yang ingin memulai usaha tetapi tidak punya uang, BMT menyediakan modal tanpa bunga. Ini sangat membantu, karena biasanya orang kecil sulit mendapatkan pinjaman dari bank biasa.

BMT juga membantu usaha-usaha kecil yang sudah berjalan dengan memberikan pembiayaan agar mereka bisa berkembang lebih besar. Semua program ini dibuat supaya masyarakat bisa menjadi lebih mandiri, produktif, dan punya penghasilan lebih baik. Dengan cara ini, BMT membantu masyarakat tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

Adapun salah satu contoh nyata dari peran BMT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti dalam jurnal penelitian mengenai BMT Maslahah Wagir di Malang. Dalam penelitian tersebut, keberadaan BMT Maslahah terbukti sangat efektif dalam mendukung peningkatan pendapatan masyarakat sekitar, terutama bagi anggota BMT yang menerima pinjaman modal usaha dan memiliki simpanan tabungan. Pinjaman modal ini memungkinkan anggota BMT untuk menjalankan atau mengembangkan usaha mereka. Hasilnya, peningkatan pendapatan ekonomi anggota berdampak pada peningkatan kesejahteraan, yang ditandai dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, mengurangi ketergantungan pada utang dengan bunga tinggi, dan bahkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Penelitian ini menyoroti peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Selain menyediakan sumber pendanaan terjangkau, BMT juga membantu masyarakat terhindar dari jeratan rentenir yang sering mengenakan bunga tinggi. Renternir menawarkan kemudahan yang cepat namun dengan risiko beban bunga yang berat, yang akhirnya menjerumuskan masyarakat dalam utang yang sulit dilunasi. BMT memberikan alternatif yang lebih adil, dengan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dan tidak memberatkan masyarakat.

Dengan dukungan pembiayaan dari BMT, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan tanpa terjebak dalam utang berbunga tinggi. Hal ini berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan karena usaha yang lebih maju dapat menghasilkan pendapatan yang lebih stabil. BMT tidak hanya menciptakan ketahanan ekonomi, tetapi juga memberdayakan usaha kecil dan mikro, serta berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. BMT dapat dijadikan sebagai model alternatif pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. 10

### Peran BMT Dalam Meminimalisir Kesenjangan Ekonomi

Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia masih memperburuk ketimpangan antara orang kaya dan miskin, dengan banyak masyarakat yang kesulitan terlibat dalam aktivitas ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk membantu masyarakat mengembangkan kemampuan mereka, seperti melalui pelatihan keterampilan baru, membuka akses modal usaha, dan mendukung usaha kecil agar

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Maulidiyah, A. F. (2019). PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM MENINGKATKAN KESEJHATERAAN EKONOMI ANGGOTA PADA BMT MASHLAHAH KANTOR CABANG WAGIR KAB. MALANG, 103.

berkembang.

Peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sangat penting dalam hal ini. Sebagai lembaga keuangan syariah, **BMT** memberikan pembiayaan tanpa bunga membantu usaha kecil tumbuh. **BMT** juga menyelenggarakan program untuk membantu masyarakat belajar keterampilan baru dan mengembangkan usaha mereka. Dengan cara ini, BMT tidak hanya membantu masyarakat bertahan hidup, tetapi juga mendorong mereka untuk maju dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga perekonomian masyarakat dapat tumbuh lebih merata.

Untuk memperbaiki perekonomian masyarakat, ada banyak rintangan yang harus dihadapi. Selain kekurangan modal, ada juga tantangan dari segi psikologis, terutama bagi umat Islam yang ingin bertransaksi dengan cara yang halal, yaitu yang sesuai dengan aturan agama, serta menghindari bunga (riba) dan ketidakpastian (gharar). Karena itu, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi masalah ini. BMT diharapkan bisa menjalankan beberapa peran penting, seperti:

- Pemberian Pembiayaan yang Mudah Diakses
   BMT mempermudah akses modal usaha bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Dengan syarat ringan dan tanpa bunga, BMT juga memudahkan nasabah dalam hal jaminan, tanpa persyaratan yang rumit.
- 2. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah BMT menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan Islam, seperti larangan merugikan melarang transaksi yang pihak manapun, memastikan pembagian risiko yang adil antara pemberi dan penerima pinjaman. Prinsip-prinsip ini menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan menguntungkan semua pihak.
- 3. Menjauhkan Masyarakat dari Praktik Ekonomi Non-Syariah
  BMT aktif memberikan penjelasan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai ekonomi Islam, agar mereka dapat memahami dan menerapkan cara bertransaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari.
- 4. Melakukan Pembinaan dan Pendanaan Usaha Kecil
  BMT tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga pendampingan dan pelatihan untuk membantu nasabah mengelola usaha, mengajarkan keterampilan baru, dan memberikan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang benar. Ini membantu usaha kecil untuk berkembang dan mengatasi kesulitan.
- Mendorong Kewirausahaan dan Penciptaan Lapangan Kerja
   Dengan memberikan pinjaman, BMT membantu masyarakat memulai atau mengembangkan usaha. Hal ini menciptakan lebih banyak peluang kerja dan membantu mengurangi pengangguran serta meningkatkan penghasilan masyarakat.
- 6. Menjaga Keadilan Ekonomi Masyarakat dengan Distribusi Merata BMT memastikan semua aktivitas dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga keadilan ekonomi, dan memastikan distribusi yang merata dalam masyarakat, sesuai dengan aturan-aturan Islam<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Anwar, M. K. (2013) 'OPERASIONAL BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KABUPATEN SIDOARJO', 4(2), pp. 170–182.

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) berperan penting dalam membantu daerah yang tidak dilayani bank konvensional, dengan fokus pada masyarakat menengah ke bawah. BMT mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk mendukung usaha serta menyediakan layanan jasa lainnya. Dengan kinerja yang profesional, BMT diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, membuktikan dirinya sebagai lembaga keuangan syariah yang dapat dipercaya dan efektif.

BMT dapat menjadi pilihan tepat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat kurang mampu dengan memberikan pinjaman usaha kecil. Pinjaman ini membantu pengusaha kecil mengelola usaha mereka dengan lebih baik dan produktif. Berbeda dengan renternir yang mengenakan bunga tinggi, BMT memberikan pinjaman yang lebih adil sesuai prinsip Islam, tanpa membebani masyarakat dengan bunga yang memberatkan.<sup>12</sup>

# Peran Pemerintah Dalam Mendukung BMT

Peran pemerintah dalam mendukung BMT terlihat dari berbagai inisiatif, seperti program pengembangan koperasi syariah di Jawa Timur dan Jawa Barat yang mencakup penguatan struktur organisasi dan manajemen usaha. Dukungan ini juga tercermin dalam Deklarasi Surabaya pada 5 November 2014, yang melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, dan pemimpin pondok pesantren, menegaskan pentingnya BMT sebagai lembaga keuangan strategis yang perlu didukung. BMT memainkan peran penting di tiga sektor utama:

- 1. Sektor Finansial: BMT menyediakan pembiayaan berbasis syariah yang bebas dari bunga dan riba, serta mendorong masyarakat untuk menabung. Hal ini menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan dan inklusif.
- 2. Sektor Riil: BMT memberikan pelatihan kepada pengusaha kecil, seperti strategi pemasaran dan manajemen usaha, untuk meningkatkan efisiensi bisnis mereka.
- 3. Sektor Religius: BMT mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah, serta menyediakan pinjaman lunak tanpa bunga (Qardul Hasan) untuk masyarakat yang membutuhkan.

Dengan kontribusi di tiga sektor ini, BMT tidak hanya mendukung pengusaha kecil tetapi juga memperkuat nilai-nilai keislaman, menjadikannya solusi penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kecil.<sup>13</sup>

Jurnal kedua yang dijadikan rujukan adalah tulisan Muslim Tanjung dan Arina Novizas berjudul "Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Perekonomian Islam". Dalam jurnal ini, dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan nyata terhadap keberadaan BMT. Dukungan ini terlihat sejak tahun 1994, ketika BMT diperkenalkan sebagai bagian dari Gerakan Nasional oleh Presiden. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari pentingnya peran BMT dalam membantu perekonomian masyarakat kecil.

Untuk legalitas operasional, BMT biasanya berbadan hukum sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Bentuk ini memungkinkan BMT menjalankan kegiatan keuangan sesuai prinsip-prinsip syariah, seperti tanpa bunga dan menghindari unsur riba. Selain itu, dengan status KJKS, BMT dapat beroperasi secara resmi dan

 $<sup>^{12}</sup>$ Ramadhan, A. F. (2023). PERAN BAITUL MAAL MATTAMWIL (BMT) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT.  ${\it EconPapers},$  4-6.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sony Hendra Permana, M. A. (2019). STRATEGI PENGEMBANGAN BAITUL MAL WATTAMWIL SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN ALTERNATIF BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DANMENENGAH. *Sony Hendra Permana dan Masyithah Aulia Adhiem Strategi Pengembangan Baitu Mal Wattamwil*, 108-109.

diawasi oleh pihak yang berwenang. Hal ini memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat yang memanfaatkan layanan BMT, terutama dalam membangun ekonomi berbasis syariah yang lebih adil dan sesuai nilai-nilai Islam. <sup>14</sup>

Penelitian Nofinawati mengungkapkan bahwa BMT Insani Padangsidimpuan memiliki peluang besar untuk berkembang berkat dukungan pemerintah melalui regulasi dan bantuan modal. Regulasi ini mencakup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang memberikan dasar hukum keberadaan BMT, serta Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 35 Tahun 2007, yang mengatur pelaksanaan serta standar operasional koperasi jasa keuangan syariah. Selain regulasi, pemerintah juga memberikan bantuan modal untuk mendukung operasional BMT. Bantuan ini terdiri dari dua jenis:

- 1. Dana Bantuan Syariah (DBS) sebesar Rp50 juta, yang harus dikembalikan dalam waktu 5 tahun bersama bagi hasilnya.
- 2. Dana Subsidi BBM sebesar Rp100 juta, yang juga harus dikembalikan dalam 10 tahun dengan cicilan Rp4 juta setiap 3 bulan. Jika dihitung, total yang harus dikembalikan adalah Rp160 juta selama 10 tahun. Meskipun bantuan ini tidak sepenuhnya berupa hibah, pihak BMT merasa sangat terbantu karena memungkinkan mereka memperluas layanan keuangan syariah kepada masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Ibu Elvi, perwakilan BMT Insani Padangsidimpuan.

Namun, terdapat tantangan besar yang dihadapi BMT. Salah satunya adalah belum adanya regulasi khusus yang secara spesifik mengatur operasional BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Peraturan yang ada saat ini bersifat umum dan belum mampu sepenuhnya mendukung kebutuhan spesifik BMT. Regulasi khusus sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat, memastikan pengelolaan yang terarah, dan memaksimalkan peran BMT dalam membantu perekonomian masyarakat. Selain itu, bantuan modal dari pemerintah sering kali berupa pinjaman yang harus dikembalikan bersama bagi hasil, sehingga menambah beban BMT dalam mengelola operasionalnya.

Secara keseluruhan, meskipun dukungan pemerintah sudah ada dalam bentuk regulasi dan bantuan dana, perhatian lebih diperlukan untuk menciptakan peraturan yang lebih spesifik dan memberikan bantuan yang tidak memberatkan. Dengan demikian, BMT dapat berkembang lebih baik, memperluas perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, dan menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang efektif dan berkelanjutan.<sup>15</sup>

Kesimpulan dari ketiga jurnal yang penulis tinjau menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap BMT sangat signifikan, namun masih terdapat keterbatasan. Berdasarkan jurnal pertama, BMT telah diakui oleh pemerintah daerah sebagai lembaga keuangan alternatif yang berpotensi bersaing dengan lembaga keuangan formal dalam pembiayaan UMKM. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat mendukung BMT melalui program peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen usaha koperasi. Dukungan ini juga tercermin dalam Deklarasi Surabaya yang melibatkan berbagai pihak untuk mendorong peran BMT sebagai institusi keuangan berkelanjutan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Muslim Tanjung, A. N. (2018). EKSISTENSI BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) DALAM PEREKONOMIAN ISI AM 29

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Nofinawati. (2021). Baitul Maal wat Tamwil (BMT):Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Padangsidimpuan. 100-105.

Jurnal kedua menunjukkan bahwa meskipun BMT telah didukung sejak peluncurannya pada tahun 1994, regulasi yang ada masih kurang kuat. Saat ini, BMT berbasis Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), yang menimbulkan kendala karena regulasi yang belum secara spesifik mengatur BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah.

Jurnal ketiga mengungkapkan bahwa meskipun BMT Insani Padangsidimpuan menerima dukungan regulasi dan bantuan modal, bantuan tersebut tidak sepenuhnya hibah, melainkan berupa pinjaman dengan ketentuan pengembalian. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung operasional BMT secara optimal, karena belum ada peraturan khusus yang mengatur BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah telah memberikan dukungan dalam bentuk regulasi, bantuan modal, dan program peningkatan kelembagaan, dukungan tersebut masih belum optimal. Regulasi khusus yang mengatur BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah sangat diperlukan agar dukungan pemerintah lebih komprehensif dan tidak membebani BMT

#### KESIMPULAN DAN SARAN

BMT (Baitul Maal wa Tamwil) memiliki peran strategis dalam mendorong ekonomi inklusif dengan menyediakan pembiayaan berbasis syariah untuk masyarakat kecil yang sulit mengakses layanan keuangan formal. Lembaga ini memberikan solusi keuangan sesuai prinsip keadilan, meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, regulasi yang belum optimal, dan kurangnya edukasi masyarakat. Dampaknya sangat signifikan, terutama dalam meningkatkan taraf hidup dan mendorong kewirausahaan di kalangan masyarakat kecil.

Peran pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan BMT, melalui kebijakan yang memfasilitasi akses modal, regulasi yang lebih mendukung, dan kerja sama dengan sektor swasta. Selain itu, BMT perlu mengedukasi masyarakat tentang layanan keuangan syariah serta mengembangkan produk keuangan inovatif untuk menjangkau lebih banyak segmen pasar. Penguatan jejaring dengan lembaga keuangan lain juga penting untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas dalam melayani masyarakat.

# **DAFTAR REFERENSI**

- Aditya Nugraha Alius, A. A. (2024). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Sumatera Barat. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (Medrep)*, 28.
- Anwar, M. K. (2013) 'Operasional Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Sidoarjo', 4(2), Pp. 170–182.
- Hapsari, W. R. (2019). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Sukowati*, 107.
- Hendra Safri. (2018). Pengantar Ilmu Ekonomi. Lembaga Penerbit Kampus Iain Palopo.
- Heron, N. (2023). Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Peningkatan Kesejahteraan. Nomisma Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen, 87. Https://Journal.Polymathes.Id/Index.Php/Nomisma/Article/View/9/6
- Khairul Imam Punantara Sitopu, S. E. (2024). Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pengelolaan Keuangan Pesantren (Studi Kasus Pada Pondok Pesantre Mawaridussalam). Edunomika, 8.
- Nofinawati. (2021). Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt):Peluang Dan Tantangan Dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Lkms) Di Kota Padangsidimpuan.

- 100-105.
- Maulidiyah, A. F. (2019). Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Meningkatkan Kesejhateraan Ekonomi Anggota Pada Bmt Mashlahah Kantor Cabang Wagir Kab. Malang, 103. Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/16631/1/15540017.Pdf
- Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, Patric C. Wauran. (2020). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa). Jurnal Berkala Ilmiah Efiensi, Volume 20 No. 03.
- Mohammad Idil Ghufron, Rohma Dewi. (2023). Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Perspektif Al- Qur'an. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan, Vol. 7 No. 02.
- Muslim Tanjung, A. N. (2018). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam. 29.
- Pujiyono, A. (2013). Peluang Dan Tantangan Baitul Maal Wat Tamwil Untuk Memberdayakan Industri Mikro, Kecil Dan Menengah Di Jawa Tengah. Semnas Fekon: Optimisme Ekonomi Indonesia 2013, Antara Peluang Dan Tantangan, 622-623. Https://Repository.Ut.Ac.Id/5080/1/Fekon2012-53.Pdf
- Ramadhan, A. F. (2023). Peran Baitul Maal Mattamwil (Bmt) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Econpapers*, 4-6. Https://Econpapers.Repec.Org/Repec:Osf:Osfxxx:Zskhu
- Ramos, R., Ranieri, R., & Lammens, J. (2013). *Inclusive Growth: Building Up A Concept*. Ipc-Ig Working Paper.
- Syaron Brigtte Lantaeda Florance Daicy J.Lengkong Joorie M Ruru. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon". Jurnal Administrasi Publik, Volume 04 Nomor 048.
- Sony Hendra Permana (2019). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Danmenengah. Sony Hendra Permana Dan Masyithah Aulia Adhiem Strategi Pengembangan Baitu Mal Wattamwil, 108-109.